

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Subarsono, 27 April 2005, *Meneguhkan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan kebijakan, Seminar Publik "Rakyat Berhak Terlibat"*, Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh FORUM LSM DIY.
- A. Hamid S Attamimi, 18 Maret 1989, *Pembentukan Undang-undangan Indonesia*, Jakarta, Makalah pada seminar Keuangan Negara di Bepeka.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, UI-Press.
- Bahan Workshop, November 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Daerah*, yang diselenggarakan oleh PKBH, FH-UGM kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta,
- Dahlan Thaib, 2000, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Liberty.
- Jurnal Demokrasi, 2003, *Position Paper*, Yogyakarta, Forum LSM DIY.
- J. Wijiyantoro, Hari Kamis Tanggal 29 Januari 2004, Makalah workshop *"Penyusunan Draft pengambilan kebijakan kota"*, Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh FORUM LSM DIY di Hotel Brongto.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Miriam Budiarto, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Rival G. Ahmad, 28 Mei 2003, *Merancang Proses Pembentukan Perda yang Partisipatif*, Jakarta, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Model Pengawasan Peraturan Daerah yang Efektif" diselenggarakan oleh

DAFTAR PUSTAKA

A. G. Subaningsih, 25 April 2002, "Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Jasa Keuangan", Yogyakarta, Yajid.

Forum LSM DIY.

A. Hidayat, 18 Maret 1990, "Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengembangan Industri Jasa Keuangan", Jakarta, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia.

Agung, 1992, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, Workshop November 2003, "Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengembangan Industri Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung, "Kelembagaan Sektor Jasa Keuangan", Jakarta: UI Press.

Agung dan Pribadi.

S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Sigit Widiarto, 13 Mei 2003, *Diskusi Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, diselenggarakan Forum LSM DIY,

Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Solichin Abdul Wahab, 1991, *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.

Saldi Isra dan Suharizal, 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Padang, Anggrek Law Firm.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *HAM: Konsep Dasar dan Penegrtiannya dari masa ke masa*, Makalah pada Kursus HAM untuk Pengacara, Jakarta, Elsam.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perdoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun

Tata Tertib Dalam Pemilihan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun

Daerah Pemilihan Rakyat

Pemilihan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Pengawasan Tata Tertib

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi

Undang-Undang Dasar 1945

Pemerintahan Provinsi

Keputusan Mahkamah pada Kursus HAM untuk Pengacara, Jakarta, Hutan

Society of Wigglers, 2003, HAM: Konsep, Aspek dan Implementasi

Anggota Law Firm

Sabti Idris dan Subianto, 2001, Teknik Penemuan Produk Kekayaan Intelektual, Padang

Indiko Murtokusumo, 1996, Aspek Hukum, Yogyakarta, Liberty

Solichon Abdul Wahid, 1991, Analisis Kepatuhan, Jakarta, Bumi Aksara

Soetoro, 1986, Law Agency, Yogyakarta, Liberty

Discretionary Form ISM DIY

Right Widiarta, 13 Mei 2003, Diskusi: Analisis Kepatuhan, PPL, Yogyakarta

Harapan

Samudra, 1999, Ilmu Politik, Kekuasaan, Hukum dan Budaya, Jakarta, Erlangga

Indonesian, Yogyakarta, Liberty

21. Agustus, 1997, Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Administrasi di